

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PD BPR BKK GIRITONTRO**

T E S I S



oleh :

AGUS PRAMONO

NIM : R.100030039
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara/
Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2006**

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PD BPR BKK GIRITONTRO**

T E S I S

Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum

oleh :

AGUS PRAMONO

NIM : R.100030039
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara/
Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2006**

MOTTO:

Untuk do'a saya awali dengan do'a Nabiyyullah Musa as :

Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah urusanku,

lepaskanlah kekakuanku dari lidahku, supaya mereka mengerti

perkataanku.....

(QS. 20 : 25 – 28)

Kupersembahkan karya kecil ini untuk:

Ibu dan Bapak tercinta, adik-adikku Sari dan

Niki, serta dik Istikhomah atas dorongan

semangat selama ini. Maaf bila persembahan

ini terlambat.

UMS Almamaterku.

ABSTRAK

Di dalam praktek perbankan yang lazim di Indonesia, pada umumnya perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank. Dengan demikian nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan untuk menerima seluruh isi perjanjian atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut. Diharapkan perjanjian kredit yang dibuat dengan klausul-klausul tertentu dapat memberikan keamanan pihak bank karena dana masyarakat yang disimpan pada bank perlu dilindungi, dan harus pula dapat melindungi nasabah selaku debitur serta dalam batas-batas tertentu sering berada pada posisi yang lemah bila berhadapan dengan bank sebagai kreditur. Berdasarkan uraian di atas, maka kajian permasalahan penulis adalah (1) Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di PD BPR BKK Giritontro?, dan (2) Bagaimanakah penyelesaian ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian di PD BPR BKK Giritontro ? Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui hal tersebut di muka adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data berupa sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi langsung dan mencatat dokumen (*content analysis*). Untuk menganalisa data yang dikumpulkan dari observasi, teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh disertai penjelasan secara logis dan sistematis untuk mendapatkan hasil signifikan dan ilmiah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Dalam perjanjian kredit di PD BPR BKK Giritontro walaupun dibuat secara standar, tetapi tetap ada kebebasan berkontrak meskipun tidak semua aspek perjanjian kredit memenuhi ruang lingkup penerapan asas kebebasan berkontrak. (2) Dalam pelaksanaan kredit di PD BPR BKK Giritontro adakalanya debitur melakukan wanprestasi, yang dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu : kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Hal ini membuktikan bahwa dalam menganalisis calon debitur, pihak PD BPR BKK Giritontro mungkin kurang cermat dan berhati-hati sehingga terjadi wanprestasi. Adapun penyelesaian wanprestasi di PD BPR BKK Giritontro adalah : pihak bank melakukan panggilan secara tertulis kepada debitur untuk diminta kesanggupan dalam membayar kredit. Namun apabila dalam waktu satu minggu debitur tidak menghadap, maka bank melakukan *somasi* yang dibuat secara tertulis. Setelah diberikan *somasi* debitur masih tidak menghadap, dalam waktu satu bulan berikutnya diberikan *somasi* yang kedua. Jika setelah *somasi* kedua debitur masih tidak menghadap maka akan diberikan *somasi* yang ketiga atau yang terakhir. Bila dalam *somasi* yang ketiga debitur masih tetap tidak menghadap maka persoalan ini akan diserahkan kepada BUPLN (Badan Usaha Penyelesaian Lelang Negara) untuk dilakukan pelelangan barang jaminan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan Judul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit di PD BPR BKK Giritontro”. Penulisan Tesis ini merupakan usaha yang optimal yang dilakukan penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari *kesempurnaan*, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna bagi kesempurnaan Tesis ini.

Untuk menyelesaikan Tesis ini tidak sedikit bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu sudah selaknyaknya penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiadji, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhamadyah Surakarta;
2. Bapak Dr. Nurhadiantomo, selaku pembimbing materi yang memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini;
3. Bapak Absori, SH, M. Hum, selaku pembimbing teknis yang memberikan bimbingan arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini;

4. Bapak H. Begug Poernomosidi Bupati Wonogiri, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengikuti studi pada program Pasca Sarjana UMS;
5. Bapak Suyarto, SE., selaku Direktur PD BPR BKK Giritontro yang telah banyak memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini;

Akhir *kata* semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Pebruari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kredit.....	13
B. Unsur-unsur Kredit.....	16
C. Fungsi Kredit.....	24
D. Jenis Kredit	25
E. Pengertian Perjanjian Kredit	33
F. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit	36
G. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit	39
H. Jaminan Dalam Perjanjian Kredit.....	40
I. Agunan Kredit	45
J. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian.....	47
K. Hapusnya Perjanjian Kredit	48

BAB III GAMBARAN UMUM PD BPR BKK GIRITONTRO

A. Sejarah Perkembangan PD BPR BKK Giritontro	50
B. Struktur Organisasi	52

BAB IV PENERAPAN ASA KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PD BRR BKK GIRITONTRO

A. Prosedur Pemberian Kredit di PD BPR BKK Giritontro.....	64
B. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit.....	72
C. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Bagan Organisasi PD BPR BKK Giritontro	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of found*) dengan pihak-pihak kekurangan dan memerlukan dana (*lack of founds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Guna mencapai kemanfaatan yang maksimal dari kegiatan perbankan tersebut, telah terbentuk suatu sistem perbankan yang berlaku secara umum dan menyeluruh, yaitu sifat serta fungsi pokok dari kegiatan bank yang hampir sama. Di balik itu pula terdapat keterkaitan kehidupan, dan kegiatan bank secara global yang melewati batas-batas negara, jadi tidak terbatas dalam suatu wilayah negara tertentu melainkan secara luas meliputi kehidupan perekonomian dunia.

Gencarnya pembentukan hukum perbankan saat ini adalah bentuk upaya penyempurnaan terhadap hukum yang telah ada. Hal itu dimaksudkan agar perbankan Indonesia memiliki landasan gerak yang kokoh yang membawa ke arah sikap yang lebih tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional, sehingga perbankan nasional mampu berperan dalam peningkatan taraf hidup orang banyak, juga mampu menjadi pelaku pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan stabilitas nasional. Dengan demikian peranan perbankan nasional dapat terwujud lebih nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat, seperti yang diatur dalam pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU Perbankan untuk melaksanakan fungsinya tersebut, usaha-usaha yang dilakukan oleh bank di antaranya adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Melakukan kegiatan dalam valuta asing.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan lain-lain.¹

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan profisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman pada nasabah, melainkan sangat kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur yang cukup banyak di antaranya meliputi : sumber-sumber kredit, alokasi, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Sehingga penanganan kredit harus dilakukan secara

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 288.

hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.

Di dalam praktek perbankan yang lazim di Indonesia, pada umumnya perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank. Dengan demikian nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan untuk menerima seluruh isi perjanjian atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut.

Diharapkan perjanjian kredit yang dibuat dengan klausul-klausul tertentu dapat memberikan keamanan pihak bank karena dana masyarakat yang disimpan pada bank perlu dilindungi, dan harus pula dapat melindungi nasabah selaku debitur serta dalam batas-batas tertentu sering berada pada posisi yang lemah bila berhadapan dengan bank sebagai kreditur.

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak, dimana kedua pihak bebas untuk membuat salah satu perjanjian, khususnya di dalam menentukan isi perjanjian. Hal ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Mengenai hal itu Abdul Kadir Muhammad menyatakan :

“Dalam ketentuan dan syarat tersebut tercermin asas kebebasan berkontrak untuk menentukan seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan apa yang terjadi antara mereka dan berapa jauh hubungan mereka itu”.²

Asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, dengan cara apapun, dengan klausa apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 133 KUH Perdata yang berbunyi : “Suatu sebab adalah terlarang bila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum”.

Dalam perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Kedudukan bank lebih kuat dibandingkan dengan calon nasabah. Padahal kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. *Bargaining power* yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya.

Yang perlu diperhatikan adalah posisi bank pada saat kredit belum diberikan dan setelah kredit diberikan. Pada waktu kredit akan diberikan, pada umumnya memang bank dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan calon nasabah debitur. Hal tersebut terjadi karena pada saat pembuatan perjanjian itu calon nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit itu dari bank. Dalam hal yang demikian itu pada umumnya calon nasabah debitur tidak akan banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh bank. Tetapi setelah kredit diberikan, ternyata kedudukan bank lemah. Kedudukan bank setelah kredit diberikan banyak

² Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni Bandung, 1982, HLM. 125.

tergantung pada integritas nasabah debitur. Banyak nasabah yang tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran pokok bersama bunganya.

PD BPK BKK Giritontro merupakan lembaga perbankan yang berkedudukan di Jl. Giritontro, Wonogiri, Jawa Tengah. Nasabah debitur dari PD BPR BKK Giritontro mayoritas adalah masyarakat menengah kebawah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan sosio-kultur masyarakat Kabupaten Wonogiri adalah petani dan pengusaha kecil atau *home industri*. Selain itu pendapatan masyarakat di sana masih cukup rendah. Sehingga banyak membutuhkan bantuan dana melalui kredit untuk mengembangkan usahanya. Mengingat keadaan tersebut maka dapat dipastikan bahwa nasabah debitur dari PD BPR BKK Giritontro kurang memiliki nilai tawar dalam melakukan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit yang dibuat antara PD BPR BKK Giritontro dengan nasabah debitur adalah perjanjian baku atau standar. Dalam perjanjian tersebut, klausul-klausul telah dirumuskan terlebih dahulu oleh pihak bank secara sepihak. Klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut cenderung merupakan upaya perlindungan bagi kreditur untuk mengatasi resiko kredit dalam hubungan kenasabahan perkreditan. Oleh karena itu nasabah sebagai calon debitur tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian kredit. Mengingat bahwa dalam perjanjian kredit tersebut telah terjadi hubungan kontraktual dan klausul-klausul tersebut cenderung berpihak pada bank selaku kreditur, maka timbul suatu pernyataan : apakah perjanjian kredit di PD BPR BKK Giritontro telah memenuhi asas kebebasan berkontrak ?

Mengingat peranannya maka dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat. Semuanya itu didasari oleh landasan pemikiran agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, serta mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif pada pencapaian sasaran pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul : **PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PD BPR BKK GIRITONTRO**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di PD BPR BKK Giritontro ?
- b. Bagaimanakah penyelesaian ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian di PD BPR BKK Giritontro ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di PD BPR BKK Giritontro.
2. Untuk mengetahui penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit di PD BKK BPR Giritontro.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang akurat saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analisis yuridis bagi tergalinya keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian antara bank dengan nasabah debiturnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan yuridis sosiologi dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan dan lapangan.

- a. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dengan menggunakan penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.
- b. Penelitian yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian yang bersifat pelengkap dalam penelitian yang terutama meneliti data primer.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data pendukung terhadap data sekunder yang bersumber pada keterangan-keterangan dari informan yang menjadi responden penelitian.

Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer berupa:

- i. Wawancara dengan pejabat-pejabat yang berwenang menangani perkreditan di kantor PD BPR BKK Giritontro.
 - ii. Wawancara dengan warga masyarakat selaku nasabah/ calon nasabah debitur.
- b. Data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan literature yang relevan dengan permasalahan yang diteliti

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Goetz & Le Comte (1984) dalam penelitian kualitatif terdapat strategi pengumpulan data yang dapat dikelompokkan dalam dua cara pokok, yaitu metode interaktif dan non interaktif. Metode interaktif meliputi interview dan observasi, sedangkan non interaktif meliputi observasi tak berperan, kuesioner, mencatat dokumen dan arsip.³

³ Soetopo, H. B., 1995. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, diperlukan cara-cara tertentu, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar, terarah dan akurat.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Moleong (2001:135) wawancara adalah “Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di-wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan”.

Bertolak pada pendapat tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara tidak terstruktur, artinya wawancara tanpa menggunakan daftar pertanyaan yang jelas, guna memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dengan pokok permasalahan seluas-luasnya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada karyawan PD BPR BKK Giritontro dan para warga masyarakat selaku nasabah atau calon nasabah debitur.

2. Metode Observasi

Dalam kegiatan observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berperan atau tidak berperan, sehingga menggunakan penelitian partisipatif atau pengamatan terlihat, di mana peneliti mengamati langsung kegiatan orang-orang yang menjadi sasaran dalam penelitian ini. Dalam observasi tak berperan, perilaku yang bergayutan

dan kondisi lingkungan dapat diamati secara formal maupun informal. Formal, observasi langsung dilakukan dengan pengamatan pada saat kegiatan pelaksanaan perjanjian kredit dengan standar baku.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mencatat arsip dan dokumen yang tersimpan tentang data-data nasabah yang melakukan kredit dengan menggunakan standar kontrak/ perjanjian baku antara nasabah debitur dengan PD BPR BKK sebagai kreditur. Dalam hal ini penulis menggunakan data berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, formulir-formulir yang tersedia dalam pelaksanaan perjanjian baku.

5. Analisa Data

Pertama berupa persiapan dengan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hukum perjanjian dan hukum kontrak baku yang berkaitan dengan hukum perbankan, literatur-literatur tentang hukum perbankan, perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat oleh lembaga bank baik secara di bawah tangan maupun notariil.

Kedua, yaitu melakukan penelusuran lapangan dengan melakukan wawancara tak terstruktur dengan responden yaitu pejabat PD. BPR BKK Giritontro, karyawan dan petugas pelaksana perjanjian kredit serta masyarakat

sebagai nasabah atau calon nasabah debitur. Penelusuran di lapangan juga dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) secara langsung di lapangan.

Ketiga, setelah data terkumpul baik dari penelusuran kepustakaan maupun penelusuran lapangan, maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh disertai penjelasan secara logis dan sistematis untuk mendapatkan hasil signifikan dan ilmiah.